

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, menegaskan bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkatan pemerintahan, guna mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Otonomi daerah dimaksudkan agar setiap daerah mampu mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga mendapatkan kemandirian wilayah (Sari, 2015). Kemandirian ini merupakan inti dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kemandirian wilayah membutuhkan dukungan dari kemandirian keuangan, mengingat pengelolaan potensi wilayah memerlukan sumber dana yang memadai. Tanpa kemandirian keuangan, pembangunan wilayah sering terhambat karena ketergantungan pada dana dari pusat. Kemandirian wilayah dan kemandirian keuangan keduanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerintahan daerah yang efektif serta berkelanjutan.

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan dari pendapatan asli daerah (PAD), tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun ukuran utama dalam kemandirian keuangan dilihat dari Proporsi PAD terhadap Total

Pendapatan Daerah, semakin besar PAD, semakin mandiri keuangan daerah tersebut. Aspek efisiensi pengelolaan keuangan yang berarti kemampuan mengelola anggaran dengan tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ukuran kemandirian keuangan dapat dilihat berdasarkan diversifikasi Sumber Pendapatan, artinya adanya sumber pendapatan yang beragam, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan asset. Adapun yang menjadi Faktor Pendukung kemandirian keuangan antara lain

- a. Kemampuan fiskal daerah dalam memungut pajak dan retribusi.
- b. Efektivitas manajemen keuangan daerah, termasuk perencanaan dan pengendalian anggaran.
- c. Dukungan kebijakan otonomi daerah yang memungkinkan fleksibilitas pengelolaan keuangan.

Pada prinsipnya Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam menyediakan dana secara mandiri untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Hal ini didukung oleh kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak serta penerimaan lain yang dipungut daerah (Halim, 2008: 232). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen utama yang mencerminkan kapasitas finansial daerah. Selain PAD, Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk secara langsung meningkatkan kebutuhan akan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Ini menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja publik. Jika pertumbuhan belanja tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maka ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat akan meningkat, sehingga **kemandirian keuangan menurun**. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk juga menciptakan peluang ekonomi baru, seperti:

- 1) Pasar tenaga kerja yang lebih besar
- 2) Peningkatan konsumsi masyarakat
- 3) Pertumbuhan sektor informal dan UMKM

Jika dikelola dengan baik, hal ini dapat meningkatkan penerimaan dari pajak daerah (seperti pajak restoran, hotel, reklame) dan retribusi, sehingga mendorong **peningkatan kemandirian fiskal**. Namun, jika pertumbuhan penduduk tidak

disertai dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas, maka akan meningkatkan beban fiskal karena:

- 1) Meningkatnya angka kemiskinan
- 2) Tingginya beban subsidi sosial
- 3) Keterbatasan kapasitas fiskal daerah

Kondisi ini bisa menurunkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, yang menjadi indikator utama **rendahnya kemandirian keuangan daerah**. Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan basis pajak. Namun, jika kapasitas fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik rendah, potensi penerimaan daerah tidak dapat dimaksimalkan. Studi **Kuncoro (2012)** menemukan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi daerah cenderung memperbesar ketergantungan fiskal terhadap pusat.

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat dapat menjadi **pedang bermata dua**: berpotensi mendorong kemandirian keuangan jika diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas fiskal, namun bisa menjadi beban jika tidak diimbangi dengan tata kelola dan kebijakan fiskal yang responsif.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Barat

TAHUN	PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)
2020	1,98
2021	1,24
2022	1,58
2023	1,54
2024	1,53

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2022

Terjadi **penurunan signifikan** dari 1,98% (2020) ke 1,24% (2021), kemungkinan akibat dampak awal pandemi COVID-19. Mulai tahun 2022 hingga 2024, pertumbuhan penduduk **stabil di kisaran 1,5%**, menunjukkan tren pemulihan dan kestabilan demografi. Tingkat pertumbuhan yang moderat seperti ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk:

- 1) Merancang kebijakan fiskal berbasis perencanaan kependudukan.
- 2) Mengoptimalkan potensi PAD dari sektor-sektor ekonomi yang padat karya atau konsumsi lokal.

- 3) Menyesuaikan belanja publik untuk layanan dasar berdasarkan proyeksi jumlah penduduk.

Rata rata Pertumbuhan penduduk Sulawesi Barat adaalh 1,57 % pertahun. Pertumbuhan penduduk moderat (sekitar 1,5%) dapat menjadi peluang untuk Meningkatkan basis pajak dan retribusi daerah, jika didominasi oleh usia produktif. Memperluas kegiatan ekonomi lokal seperti perdagangan, jasa, dan UMKM, yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Mendorong **peningkatan** kemandirian keuangan bila pertumbuhan penduduk sejalan dengan penciptaan peluang ekonomi.

Selain peluang, Potensi Risiko bisa terjadi jika pertumbuhan penduduk tidak diiringi oleh peningkatan PAD, maka:

- a) Beban pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) akan meningkat.
- b) Ketergantungan pada transfer pusat (DAU, DAK) tetap tinggi → kemandirian fiskal melemah.

Khusus di Sulawesi Barat, jika sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor informal atau belum terakses pajak daerah, maka dampak positifnya terhadap PAD masih terbatas.

Meskipun secara teoritis pertumbuhan penduduk dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dampak positif tersebut sangat bergantung pada struktur ekonomi masyarakat. Dalam konteks Sulawesi Barat, sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor **informal**, seperti perdagangan kecil, pertanian subsisten, dan usaha mikro yang tidak tercatat dalam basis pajak daerah. Kondisi ini menyebabkan potensi PAD yang semestinya meningkat akibat penambahan jumlah penduduk, justru **belum termanfaatkan secara optimal**.

Menurut teori **base theory** dan **local fiscal capacity** (Musgrave, 1959), kemampuan daerah dalam menggali PAD sangat bergantung pada **struktur ekonomi dan basis pajak yang kuat**. Jika basis ekonomi masyarakat tidak tercatat atau sulit dijangkau oleh sistem perpajakan, maka potensi fiskal daerah tidak akan tergali dengan maksimal, meskipun jumlah penduduk meningkat. Dalam hal ini, penduduk tidak berkontribusi sebagai subjek pajak aktif, tetapi tetap memerlukan layanan publik dari pemerintah daerah.

Selain itu, **teori Leviathan (Brennan & Buchanan, 1980)** menyatakan bahwa pemerintah cenderung akan memaksimalkan pendapatan yang bisa diperoleh jika diberi kewenangan fiskal. Namun dalam praktiknya, terutama di daerah dengan dominasi sektor informal, pemerintah daerah menghadapi **kendala struktural dan administratif** dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Berdasarkan data BPS dan laporan keuangan daerah, sebagian besar lapangan usaha di Sulawesi Barat masih didominasi oleh sektor-sektor tradisional dan informal. Ini berimplikasi pada **rendahnya rasio pajak daerah terhadap total PDRB**, yang menandakan belum optimalnya kontribusi ekonomi lokal terhadap kemandirian fiskal.

Selain pertumbuhan penduduk, tingkat Investasi merupakan salah satu faktor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemandirian fiskal suatu daerah. Tingkat investasi merupakan salah satu determinan strategis dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah. Investasi—baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)—memiliki efek berantai (*multiplier effect*) terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan basis penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat, realisasi investasi pada tahun 2024 mencapai Rp2,92 triliun, meningkat sebesar 23,43% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun baru mencapai sekitar 75% dari target nasional sebesar Rp3,9 triliun. Kenaikan signifikan juga tercatat pada triwulan II tahun 2024, dengan nilai investasi sebesar Rp1,775 triliun, meningkat dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Secara teoritis, teori pertumbuhan endogen (*Endogenous Growth Theory*) yang dikembangkan oleh Romer (1986) menyatakan bahwa investasi memiliki peran sentral dalam meningkatkan produktivitas dan output jangka panjang suatu wilayah. Investasi mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan secara tidak langsung akan memperluas basis objek pajak serta retribusi yang menjadi sumber PAD.

Di **Provinsi Sulawesi Barat**, tren investasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan **perkembangan yang positif**. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), terjadi peningkatan nilai

realisasi investasi, terutama di sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, dan energi. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan PDRB, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai layanan publik secara mandiri.

Investasi ini tersebar di berbagai sektor unggulan, antara lain sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan infrastruktur. Pemerintah daerah mendorong pembangunan infrastruktur penghubung antara pegunungan dan pesisir untuk mempermudah distribusi hasil komoditas lokal seperti sukun, pisang, kopi, dan kakao. Peningkatan investasi di sektor-sektor tersebut berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Dampak langsung dari peningkatan investasi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sumber penerimaan seperti pajak daerah dan retribusi. Seiring dengan meningkatnya PAD, ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dapat ditekan. Hal ini mencerminkan peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian Setiawan (2020) dan Rizki & Sari (2022) juga memperkuat temuan ini, bahwa daerah dengan realisasi investasi tinggi cenderung memiliki PAD yang lebih kuat dan lebih mampu mengelola keuangannya secara mandiri. Oleh karena itu, strategi peningkatan investasi di Sulawesi Barat merupakan salah satu pendekatan kebijakan yang potensial untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung kemandirian daerah dalam jangka panjang.

Kajian tentang kemandirian keuangan daerah telah banyak dilakukan, diantaranya Penelitian Kustianingsih, (2018) yang hasilnya menunjukkan jika PAD berdampak positif terhadap kemandirian keuangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian Haryanto (2019) menunjukkan jika PAD berdampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian terkait dengan pengaruh antara belanja modal dan kemandirian keuangan daerah dilakukan oleh Haryanto (2019) yang menunjukkan jika belanja modal tidak mempunyai pengaruh dalam kemandirian keuangan daerah kepada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Sari (2015) menyatakan jika belanja modal berdampak positif dalam kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau kota di DIY.

Kemandirian keuangan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadapi tantangan dalam pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta alokasi belanja daerah yang efektif.

Tabel 1.2 Tantangan Optimallisasi PAD Sulawesi Barat

Aspek Tantangan	Penjelasan
Ketergantungan pada Transfer	- Ketergantungan tinggi pada DAU, DAK, dan DBH dari pusat. - Rasio PAD terhadap total pendapatan masih rendah.
Tantangan Pengoptimalan PAD	- Potensi ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata) belum dimaksimalkan. - Kepatuhan pajak dan retribusi masih rendah. - SDM dan sistem fiskal belum memadai.
Alokasi Belanja Tidak Efektif	- Belanja pegawai lebih dominan dari belanja modal. - Kurangnya belanja produktif untuk peningkatan ekonomi daerah. - Anggaran belum outcome-based.
Implikasi Strategis	- Perlu penguatan sistem pemungutan PAD. - Efektivitas belanja publik harus dievaluasi. - Perlu sinergi fiskal antara Pemprov dan kabupaten/kota.

Sumber: data diolah, 2025

Provinsi Sulawesi Barat berhadapan dengan tantangan untuk merumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan PAD, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan pajak, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan peningkatan investasi di sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu optimalisasi belanja modal untuk investasi infrastruktur dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD dan kemandirian keuangan daerah. Mengurangi ketergantungan pada transfer pusat melalui diversifikasi sumber pendapatan juga penting untuk mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik di masa depan.

Pada tahun 2022, BPK RI melaksanakan penilaian terhadap kemandirian keuangan pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan ditemukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih belum mandiri. Hasil audit memperlihatkan bahwa pada tahun anggaran 2019, terdapat 458 dari 497 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori belum mandiri,

Tabel 1.3 Data Realisasi PAD per Kabupaten

Entitas	Pendapatan Asli Daerah			Pendapatan Transfer			Lain-lain Pendapatan yang Sah			Total Pendapatan
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
Prov. Sulawesi Barat (*)	428,26	457,96	106,93	1.466,67	1.434,59	97,81	1,34	2,06	153,66	1.894, 61
Kab. Mamuju (*)	86,38	75,89	87,86	970,95	959,00	98,77	40,18	41,36	102,93	1.076,25
Kab. Majene (*)	136,46	70,56	51,71	779,35	761,57	97,72	3,00	1,23	40,9	833,36
Kab. Polewali Mandar	217,47	199,07	91,54	1.165,92	1.147,37	98,41	65,95	62,11	94,19	1.408,56
Kab. Mamuju Tengah	33,13	30,32	91,52	579,23	575,73	99,40	6,07	5,22	85,98	611,28
Kab. Pasang kayu (*)	46,50	46,83	100,72	795,52	795,30	99,97	0,30	0,41	138,24	842,54
Kab. Mamasa (*)	31,68	19,30	60,92	858,43	828,54	96,52	15,00	14,44	96,30	862,29

Keterangan : (*)data audited 2022

Berdasarkan data realisasi pada tabel diatas, menunjukkan bahwa pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat, hal ini ditandai dengan nilai Pendapatan Asli Daerah di semua Pemerintah Daerah yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan transfer.

Urgensi penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Investasi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat sangat penting dalam konteks tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini relevan karena Sulawesi Barat, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian keuangan dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat?
2. Apakah Pertumbuhan Penduduk berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat?
3. Apakah Tingkat Investasi berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat investasi secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Investasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat investasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori kemandirian keuangan daerah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mempelajari dinamika keuangan daerah.
2. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai kinerja keuangan daerah, khususnya dalam konteks PAD, Pertumbuhan Penduduk dan tingkat investasi. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antar variabel ini dapat membantu dalam merumuskan teori-teori baru terkait pengelolaan keuangan daerah.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi aspek-aspek lain dari kemandirian keuangan daerah, termasuk faktor-faktor eksternal, pengaruh kebijakan pemerintah, dan aspek-aspek sosial-ekonomi lainnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Temuan penelitian dapat digunakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan PAD dan mengelola belanja daerah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan, pemerintah dapat mengarahkan kebijakan fiskal yang lebih tepat.
2. Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran dengan lebih baik. Dengan mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk dan Tingkat Investasi terhadap kemandirian keuangan, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan efektif.
3. Hasil penelitian ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Efisiensi ini penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Investasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Subjek

Penelitian ini berfokus pada keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan subjek utama sebagai berikut:

- a) Unit Analisis: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- b) Responden: Aparatur yang bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan daerah, seperti pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), staf perencanaan, serta bagian anggaran di tingkat pemerintah provinsi.

2. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilakukan pada wilayah administratif Provinsi Sulawesi Barat, yang mencakup kabupaten dan kota dalam provinsi tersebut. Daerah ini dipilih karena:

- a) Karakteristik Ekonomi:
Potensi PAD yang cukup besar tetapi tingkat kemandirian keuangan masih rendah.
- b) Konteks Regional:
Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan ketergantungan tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.

3. Ruang Lingkup Variabel Penelitian

Penelitian ini mencakup tiga variabel independen dan satu variabel dependen:

Variabel Independen:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Diukur dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.
2. Pertumbuhan Penduduk
Diukur berdasarkan laju pertumbuhan penduduk tahunan (%)
3. Tingkat Investasi
Diukur berdasarkan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Asing (PMA)

Variabel Dependen:

Kemandirian Keuangan Daerah: Diukur melalui rasio kemandirian keuangan, yaitu perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah.

6. Ruang Lingkup Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

a) Teoritis:

Mengembangkan literatur tentang faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah di Indonesia, khususnya di daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi.

b) Praktis:

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi PAD, pertumbuhan penduduk, dan tingkat investasi yang produktif.

1.6 Defenisi dan Istilah

Definisi dan istilah yang relevan dalam penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Investasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat, antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**Definisi:**

PAD adalah seluruh penerimaan yang berasal dari sumber daya daerah yang sah dan tidak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Referensi:

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Indikator PAD (Bastian, 2006):

Pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Istilah terkait:**Kemandirian PAD:**

Kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan dengan menggunakan pendapatan asli yang diperoleh dari potensi lokal.

2. Pertumbuhan penduduk**Definisi:**

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam persentase per tahun.

3. Tingkat Investasi

Tingkat investasi adalah ukuran jumlah dana atau modal yang ditanamkan oleh pihak swasta maupun publik dalam suatu wilayah pada periode tertentu, baik dalam bentuk fisik (bangunan, mesin) maupun non-fisik (modal kerja, teknologi).

Indikator Umum:

- 1) Jumlah proyek investasi
- 2) Nilai realisasi investasi (dalam Rupiah atau USD)
- 3) Sektor tujuan (industri, pariwisata, perdagangan, dll.)

4. Kemandirian Keuangan Daerah**Definisi:**

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan belanja daerah dari pendapatan yang diperoleh secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat.

Indikator Kemandirian Keuangan (Mardiasmo, 2018):

Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, tingkat ketergantungan pada dana perimbangan, dan kapasitas fiskal daerah.

Istilah terkait:

Rasio Kemandirian Keuangan: Ukuran tingkat otonomi daerah dalam pengelolaan keuangannya.

5. Provinsi Sulawesi Barat**Definisi:**

Provinsi Sulawesi Barat adalah wilayah administratif di Indonesia yang terbentuk pada tahun 2004. Provinsi ini memiliki karakteristik ekonomi

dengan potensi sumber daya alam yang signifikan tetapi tingkat ketergantungan fiskal yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

Berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi sehingga diangkat menjadi objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka,

Membahas tentang landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis dalam menganalisis hasil penelitian - penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis sebagai pernyataan akurat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian,

Bab ini menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

Bab IV Metode Penelitian,

Membahas variabel penelitian, definisi optimal yang dapat memberikan deskripsi tentang variable-variabel yang dapat digunakan dalam penelitian. jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel penelitian serta darimana data tersebut diperoleh, metode pengumpulan data dan menjelaskan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, metode analisis yang berisi instrument penelitian yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis.

Bab V Hasil Penelitian,

Mendeskripsikan obyek penelitian dan menyajikan data - data deskripsi hasil analisis statistik yang telah dilakukan.

Bab VI Pembahasan,

Membahas hasil - hasil penelitian yang telah diteliti.

Bab VII penutup,

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah (*Regional Development Theory*)

1. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah (*Regional Economic Development Theory*), oleh Richard B. Andrews (1953), John Friedmann (1966), dan Walter Isard (1960). Dalam konteks penelitian ini dijelaskan bahwa Pertumbuhan ekonomi dan investasi yang terdistribusi secara merata akan menciptakan kemandirian daerah. Peran aktif pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber daya lokal (termasuk pajak, retribusi, dan investasi) menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Relevansinya bahwa kemandirian keuangan daerah dipandang sebagai output dari proses pembangunan ekonomi lokal yang sehat. Jika pertumbuhan penduduk disertai penciptaan peluang ekonomi dan masuknya investasi, maka PAD akan meningkat, yang memperkuat kemandirian fiskal.

2. Teori Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization Theory*), Richard Musgrave (1959) & Wallace E. Oates (1972). Desentralisasi fiskal akan lebih efektif jika daerah mampu menghasilkan PAD sendiri dan tidak hanya mengandalkan dana transfer. Investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal harus didorong melalui wewenang fiskal yang optimal. Dalam konteks penelitian ini, teori ini menjelaskan mengapa kemandirian fiskal merupakan indikator keberhasilan desentralisasi. Menguatkan pentingnya pengelolaan penduduk dan investasi sebagai instrumen peningkatan PAD.

3. Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*) oleh Paul Romer (1986), Robert Lucas (1988). Konsep utama teori ini bahwa Investasi dalam sumber daya manusia, teknologi, dan modal fisik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung oleh investasi dan inovasi akan menghasilkan basis penerimaan daerah yang kuat. Dalam konteks penelitian ini dijelaskan bahwa tingkat investasi yang tinggi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Tabel 2.1 Landasan Teoritis/Grand Theory

Variabel	Teori Pendukung
Pertumbuhan Penduduk	Regional Development Theory
Tingkat Investasi	Endogenous Growth Theory & Regional Development
Kemandirian Keuangan	Fiscal Decentralization Theory

Sumber: Data di olah, 2025

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.2.1 Pengertian PAD

Pendapatan asli daerah adalah uang tunai yang diperoleh dan dikumpulkan oleh kabupaten sesuai peraturan dan pedoman setempat (Sanjaya dan Wijaya, 2009). Salah satu jenis gaji provinsi yang penting bagi pembangunan wilayah adalah gaji khas lingkungan. Gaji unik daerah adalah uang tunai yang berasal dari dalam kabupaten dan diterbitkan oleh pemerintah daerah (Arifin dkk, 2013). Sumber dari gaji teritorial adalah banyaknya eksekutif di tingkat provinsi, pungutan lokal, biaya provinsi dan tunjangan sah lainnya.

PAD juga mencakup retribusi daerah, yang merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah dapat berasal dari berbagai layanan publik seperti pengelolaan pasar, pelayanan kesehatan, dan perizinan usaha. Pendapatan dari retribusi daerah membantu dalam pembiayaan operasional pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur lokal. Dengan demikian, pengelolaan retribusi yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah. Sumber lain dari PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memainkan peran penting dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Selain itu, PAD juga bisa berasal dari pendapatan sah lainnya seperti dana hibah dan pendapatan dari kerjasama antar daerah. Keanekaragaman sumber PAD ini memberikan fleksibilitas dan kemandirian fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan

melaksanakan program pembangunan. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, PAD dapat menjadi alat yang efektif untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2 Indikator PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang berasal dari berbagai potensi daerah dan pengelolaan sumber daya. Berikut adalah beberapa indikator PAD menurut para ahli, diantaranya Ahmad Yani (2018) dalam bukunya "Pengantar Ekonomi Daerah" menyatakan bahwa indikator utama PAD terdiri dari pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang sah. Pengelolaan yang baik dari sumber-sumber ini dapat meningkatkan

Kuncoro, M. (2019) dalam penelitiannya tentang "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah" menjelaskan bahwa salah satu indikator PAD adalah kemandirian fiskal, yaitu rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah. Kemandirian fiskal yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dalam konteks Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Mardiasmo (2009) dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik" menyatakan bahwa indikator lain dari PAD adalah pertumbuhan ekonomi lokal, yang dapat diukur dengan pertumbuhan sektor-sektor yang menjadi sumber pendapatan daerah, seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Pertumbuhan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD.

Dalam hal Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pendapatan, Budi Santoso (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa indikator penting dalam meningkatkan PAD adalah efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan. Indikator ini dapat diukur dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan untuk pengumpulan pendapatan dengan jumlah pendapatan yang berhasil dikumpulkan. Suharto (2020) mengemukakan bahwa ketersediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu merupakan indikator penting dalam meningkatkan PAD. Data yang baik akan mendukung analisis dan perencanaan yang lebih efektif dalam pengelolaan PAD.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, beberapa indikator PAD yang dapat digunakan antara lain:

- 1) Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah.
- 2) Pertumbuhan sektor-sektor yang menjadi sumber PAD.
- 3) Persentase realisasi PAD dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- 4) Efisiensi pengumpulan pendapatan, diukur dari biaya yang dikeluarkan untuk pengumpulan PAD.
- 5) Ketersediaan dan akurasi data pendapatan.

Indikator PAD sangat penting dalam mengukur kemandirian dan keberlanjutan keuangan daerah. Dengan memahami indikator ini, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan PAD, yang pada gilirannya akan mendukung kemandirian keuangan daerah.

2.1.3 Pertumbuhan Penduduk

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Penduduk

Secara umum, pertumbuhan penduduk adalah peristiwa mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Dilansir dari jurnal penelitian yang berjudul *Dampak Pertumbuhan Penduduk dan Stratifikasi Sosial Terhadap Sikap Ekonomi (Studi Deskriptif di Desa Kalitirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)*, mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Komponen-komponen tersebut adalah (1) kelahiran atau fertilitas, (2) kematian atau mortalitas, (3) migrasi masuk, dan (4) migrasi keluar. Dalam pertumbuhan penduduk, selisih antara jumlah kelahiran dengan kematian disebut dengan pertumbuhan alamiah. Sementara itu, selisih antara jumlah migrasi masuk dengan migrasi keluar disebut dengan migrasi neto. Namun, banyaknya jumlah penduduk di suatu negara bukan berarti dapat memberikan keuntungan bagi negara. Terdapat tujuh konsekuensi negatif dari adanya jumlah penduduk di suatu negara yang berdampak pada ekonomi negara, yakni kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, migrasi internasional, dan distribusi pendapatan.

Secara umum, proses pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia ini tentu saja memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi negara.

Dampak Positif Pertumbuhan Penduduk

1. Tersedianya tenaga kerja (Sumber Daya Manusia) untuk meningkatkan produksi dalam proses pemenuhan kebutuhan penduduk negara.
2. Berkembang berbagai jenis usaha lokal karena sejalan dengan bertambahnya kebutuhan penduduk akan pangan, sandang, dan papan.
3. Meningkatnya penanaman modal.
4. Meningkatnya inovasi produktivitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Misalnya pengembangan inovasi pupuk dan benih dalam usaha pertanian.

Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk

1. Meningkatnya angka pengangguran
2. Meningkatnya angka kriminal
3. Peningkatan angka kemiskinan negara
4. Berkurangnya lahan untuk kepentingan pertanian dan pemukiman penduduk
5. Bertambahnya limbah pabrik dan polusi
6. Bertambahnya sampah
7. Ketersediaan pangan menjadi berkurang
8. Menurunnya kesehatan penduduk
9. Terjadinya eksploitasi anak

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Barat berada pada kisaran 1,24% hingga 1,98% per tahun. Pertumbuhan ini di satu sisi menciptakan peluang, karena peningkatan jumlah penduduk dapat memperluas basis penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal. Dengan jumlah penduduk yang lebih besar, potensi penerimaan dari sektor konsumsi, perdagangan, serta pelayanan publik juga meningkat. Namun demikian, pertumbuhan penduduk juga membawa **dampak negatif** jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal daerah. Jumlah penduduk yang terus meningkat menimbulkan tekanan terhadap

infrastruktur publik, meningkatkan kebutuhan belanja sosial, serta memperbesar risiko pengangguran dan kemiskinan jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan PAD justru dapat memperburuk rasio kemandirian keuangan, yang mengindikasikan bahwa daerah semakin bergantung pada dana transfer pusat.

2.1.4 Tingkat Investasi

2.1.4.1 Pengertian Tingkat Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang (Tendelilin, 2001). Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

2. Jenis-jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset rill. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

a. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukak dengan membeli aktiva yang tidak

diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.

b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

3. Investasi Syariah Investasi syariah adalah sebuah investasi berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya.

Ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, risiko dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu di ketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi.

a. Menurut jangka waktunya

- 1) Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan.
- 2) Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun.
- 3) Investasi jangka panjang.

b. Menurut risiko

Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return. Keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi di kenal istilah "*high risk high return, low risk low return*". Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar. Yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian (uncertainty). Kalau kemudian risiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan di larang, maka akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian gharar atau risiko.

Seperti yang dilakukan oleh Al-Suwailem yang membedakan risiko menjadi dua tipe. Yakni yang pertama adalah risiko pasif, seperti game of chance, yang hanya mengandalkan keberuntungan. Kedua, risiko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis.

c. Menurut Prosesnya

- 1) Investasi langsung, yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan prantara. Dalam hal ini investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut.
- 2) Investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan prantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi.

2.1.5 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.5.1. Pengertian Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri melalui optimalisasi sumber daya lokal, tanpa ketergantungan yang signifikan pada pemerintah pusat. Konsep ini mencerminkan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber daya keuangan lain yang berasal dari potensi lokal.

Mardiasmo (2009) mendefinisikan Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah guna membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Halim (2012), mengartikan kemandirian keuangan daerah sebagai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dari sumber-sumber pendapatan yang sah, terutama PAD. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah cerminan kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokalnya melalui penggalan PAD yang efisien dan efektif, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Saragih (2003) mengartikan kemandirian keuangan daerah sebagai kemampuan daerah dalam mendanai kegiatan administrasi dan pembangunan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan internal daerah seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. Sementara itu Putra dan Haryanto (2020) Kemandirian keuangan daerah adalah ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansialnya secara mandiri melalui optimalisasi potensi lokal, dengan minimnya intervensi dari pemerintah pusat.

Pengertian Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menurut Tilawatil dan Rina (2019), Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Pengertian kemandirian keuangan daerah menurut Wike dan Halmawati (2020) yaitu Kemandirian keuangan pada daerah adalah kemampuan pemerintah yang ada di daerah mampu membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat di perlukan oleh daerah.

Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah untuk melihat mampu tidaknya suatu daerah untuk menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak dan untuk melihat berapa besar tingkat ketergantungan daerah tersebut kepada sumber dana selain yang mampu di hasilkan sendiri.

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Tingkat kemandirian ini tidak hanya mencerminkan kemampuan finansial suatu daerah tetapi juga efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya lokalnya. Indikator-indikator seperti rasio kemandirian, pertumbuhan PAD, dan efektivitas PAD memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana daerah dapat mandiri secara finansial. Dengan demikian, peningkatan PAD, pengelolaan anggaran yang baik, dan optimalisasi potensi lokal adalah langkah utama dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

2.1.5.2 Indikator Kemandirian Keuangan

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tangkilisan (2007: 89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

- 1) Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
- 2) Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau

- 3) Lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2.1.5.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007:96) "PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut Bagus Handoko, dkk (2019) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2.2. Tinjauan Empiris

Berikut adalah kajian empiris berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Investasi terhadap kemandirian keuangan daerah:

Sari dan Nursidik (2019) melakukan penelitian di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia dan menemukan bahwa PAD, Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Investasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan pengelolaan belanja yang baik dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Susilowati (2020) dalam penelitiannya di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya meningkatkan PAD sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Rinaldi (2021) mengkaji belanja modal dan Tingkat Investasi di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan, sementara Tingkat Investasi tidak berpengaruh signifikan. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam belanja modal lebih

mendukung kemandirian keuangan daerah dibandingkan dengan pengeluaran untuk pegawai.

Yusuf dan Pradana (2021) meneliti kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dan menemukan bahwa PAD dan belanja modal secara signifikan mempengaruhi kemandirian keuangan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi sumber PAD untuk meningkatkan otonomi daerah.

Samsudin (2022) melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Besar dan menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh PAD dan belanja modal. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pengelolaan belanja dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Fauzi (2023) melakukan analisis di Provinsi Sumatera Barat dan menemukan bahwa PAD berkontribusi signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa daerah dengan PAD yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemandirian yang lebih baik, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Halim dan Nurdin (2019) melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Selatan dan menemukan bahwa Tingkat Investasi memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pegawai yang tinggi dapat mengurangi fleksibilitas fiskal daerah.

Wahyuni (2020) meneliti pengaruh PAD dan belanja daerah di Kota Makassar dan menemukan bahwa keduanya berkontribusi positif terhadap kemandirian keuangan. Penelitian ini menyarankan peningkatan PAD melalui pengembangan potensi daerah.

Hidayat dan Sofyan (2021) dalam studi mereka menemukan bahwa ada hubungan positif antara belanja modal dan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Kalimantan. Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur melalui belanja modal penting untuk meningkatkan kapasitas pendapatan daerah.

Sulastri, dkk. (2020) dalam studinya tentang *Analisis Pengaruh Investasi, PAD, dan PDRB terhadap Kemandirian Fiskal Daerah di Indonesia* Penelitian ini menemukan bahwa Investasi berperan sebagai pendorong tidak langsung kemandirian melalui peningkatan PAD. Diperlukan sinergi antara investasi, pelayanan publik, dan pengelolaan fiskal agar kemandirian tercapai optimal.

Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kemandirian keuangan melalui pengelolaan yang efektif terhadap PAD dan belanja daerah. Hal yang membedakan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu, adalah penelitian ini fokus pada konteks spesifik Provinsi Sulawesi Barat, metodologi berbeda, data terbaru, dan analisis mendalam terhadap interaksi antara variabel-variabel yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Sulawesi Barat.